



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER- 10 /MBU/2013**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah diatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- b. bahwa rumusan nama jabatan Staf Pelaksana sebagai jabatan di bawah eselon terendah di lingkungan Kementerian BUMN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana huruf a di atas, sehingga dalam rangka mendukung dan menata manajemen SDM aparatur yang akuntabel, maka perlu untuk menyusun jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER 05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 2

1. Setiap CPNS di lingkungan Kementerian BUMN diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
2. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
3. Penamaan Jabatan Fungsional Umum adalah penyebutan jabatan dibawah eselon terendah yang menjadi identitas untuk memberikan kejelasan tugas dan fungsinya yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
4. Nama-nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3 .../3





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

**Pasal 3**

1. Tingkat Jabatan Fungsional Umum terdiri dari :
  - a. Tingkat Terampil, dan
  - b. Tingkat Ahli.
2. Persyaratan jabatan masing-masing tingkat Jabatan Fungsional Umum pada ayat 1 berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang pola karier pegawai di lingkungan Kementerian BUMN.

**Pasal 4**

Perubahan terhadap jumlah dan penamaan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

**Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1624

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Peraturan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : PER- 10/MBU/2013  
Tanggal : 21 November 2013  
Halaman 1/2

JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

Unit Kerja	No	Nama Jabatan Fungsional Umum
<b>A. Sekretariat Kementerian BUMN</b>		
<b>1. Biro Perencanaan dan SDM</b>	1.	Perencana Pertama
	2.	Analisis Struktur Organisasi dan Tata Laksana
	3.	Pengolah Data Laporan
	4.	Pengadministrasi Layanan SDM Kementerian BUMN
	5.	Pengadministrasi Data SDM Kementerian BUMN
	6.	Analisis Manajemen SDM Kementerian BUMN
	7.	Analisis Pengembangan SDM Kementerian BUMN
	8.	Analisis SDM BUMN
	9.	Penata Laporan Keuangan
	10.	Analisis Perbendaharaan
	11.	Verifikator Keuangan
<b>2. Biro Hukum</b>	12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama
	13.	Analisis Telaahan Pelayanan dan Bantuan Hukum
<b>3. Biro Umum dan Humas</b>	14.	Asisten Pustakawan
	15.	Pengadministrasi Surat
	16.	Asisten Arsiparis
	17.	Caraka
	18.	Sekretaris Pimpinan
	19.	Pengelola Ruang Rapat
	20.	Pengelola Persediaan
	21.	Pengelola Barang Milik Negara
	22.	Pemelihara Peralatan dan Mesin
	23.	Pemelihara Kendaraan Dinas
	24.	Pemelihara Gedung Kantor
	25.	Pengelola Publikasi Informasi
	26.	Protokol
	27.	Pengemudi
<b>4. Inspektorat</b>	28.	Pengolah Data Audit
<b>B. Kedeputan Teknis</b>		
<b>1. Keasdepan Bidang Usaha Primer</b>	29.	Analisis Data BUMN
<b>2. Keasdepan Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur</b>	30.	Analisis Data BUMN
<b>3. Keasdepan Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik</b>	31.	Analisis Data BUMN
<b>4. Keasdepan Bidang Usaha Jasa</b>	32.	Analisis Data BUMN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Peraturan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : PER- 10/MBU/2013  
Tanggal : 21 November 2013  
Halaman 2/2

Unit Kerja	No	Nama Jabatan Fungsional Umum
<b>C. Kedeputan Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN</b>		
1. Keasdepan Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha	33.	Analisis Data BUMN
2. Keasdepan Pendayagunaan Aset dan Sinergi	34.	Analisis Data BUMN
3. Keasdepan Pembinaan PKBL	35.	Analisis Data BUMN
4. Keasdepan Riset dan Informasi	36.	Pranata Komputer Pertama
	37.	Pengelola Jaringan Sistem Informasi
	38.	Peneliti Pertama
	39.	Penyaji Data

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA,

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001